

DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI NAGARI SINGKARAK KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

DIFA SALSABILA, SORAYA OKTARINA

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

difasalsabila0107@gmail.com, Sorayaoktarin4@gmail.com

Abstract

Community participation is an important factor in holding elections. Various efforts continue to be made to increase political participation in elections, one of which is through political education programs. The most strategic political education target is the group of beginner voters as potential voters. In Singkarak the level of community political participation reached 70.90%. with a percentage of 15% being the votes of first-time voters. The research method used is a field research method with a qualitative descriptive method. The aim of the research is to see whether the rate of political participation in Nagari Singkarak is caused by efforts to increase political education. The research results show that political education has an impact on voter participation in elections. In Nagari Singkarak, novice voters admitted that they received political education through the formal education route they took. Apart from that, political education is also obtained by novice voters through political socialization activities carried out by a number of political actors in Nagari Singkarak, starting from the KPU, political parties, community organizations, community institutions, families and mass media. Meanwhile, according to Siyasah Fiqh, appointing an imam (leader) is obligatory, the obligatory status is fardhu kifayah. So if someone does not play a role in choosing a leader, it means that he is not carrying out what has been ordered by Islamic law)

Kata Kunci : participation, education, politics



A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokratis. Pemerintahan Indonesia dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya hak diapilih dan memilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi Masyarakat untuk bisa mencalonkan diri atau memilih calon yang akan duduk di bangku pembuat kebijakan. Tak hanya itu pemilihan umum juga berguna dalam mengevaluasi pandangan dan program kandidat mana yang dapat memenuhi kebutuhan komunitasnya¹. Keberhasilan pemilu ditentukan oleh sejauh mana warganya melakukan atau ikut serta dalam pelaksanaan tersebut atau yang disebut dengan partisipasi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangatlah penting. Sebab, rendah atau tingginya tingkat partisipasi merupakan indikator penting kemajuan proses demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan suatu bangsa². Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, maka semakin besar kemungkinan warga negara untuk mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam urusan nasional. Sitepu mengatakan partisipasi politik adalah suatu tindakan sah atau sukarela yang dilakukan warga negara sehubungan dengan kebijakan pemerintah, yang dapat dilakukan

¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018)

² NS Sari, "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di Sma Kecamatan Bantul," *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 2019, 323–31



oleh individu atau kelompok berdasarkan kemauan atau gerakan. Menurut Davis dalam Sastroadmojo, partisipasi politik bisa berupa masyarakat itu mencalonkan diri menjadi yang dipilih ataupun masyarakat itu menjadi pemilih langsung dalam pelaksanaan pemilu.

Di Indonesia pemilu baru saja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada saat yang sama juga dilakukan pemungutan suara untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. Pada pemilu kali ini jumlah keseluruhan pemilih di Sumatera Barat yaitu 4.088.606 orang dengan total pemilih pemula 2.400.072 orang atau setara dengan 58,70%. Jumlah pemilih pemula pada pemilu ini meningkat dibandingkan pada pemilu 2019 lalu yang hanya 33,33%. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah pada hari pemungutan suara dan mempunyai hak memilih tanpa dianggap sebagai pemilih menurut ketentuan undang-undang pemilu.³ Pemilih pemula adalah agen perubahan dalam pemilu. Mereka dapat membawa ide-ide segar untuk memilih pemimpin terbaik dan mengambil keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan partisipasi pemilih pemula juga terjadi di tingkat daerah, salah satunya di nagari Singkarak Kabupaten Solok. Pada pemilu 2019, dengan jumlah DPT Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 26.360, tingkat partisipasi politik Nagari Singkarak

³ Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum."h.59

mencapai 70,90%. Dari total partisipasi tersebut 15% nya adalah pemilih pemula. Jumlah Pemilih pemula tersebut menjadi suara pemilih yang potensial dalam memberikan hak suara. Untuk itu, perlu adanya alasan serta penentuan pilihan yang tepat bagi para pemilih tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan dan alasan rasional pilihan pemilih pemula adalah tingkat pendidikan politik⁴.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai suatu proses cerdas untuk mengubah interaksi politik di masyarakat agar masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai sistem politik yang baik yang akan diputuskan di masa depan. Gabriel Almond menjelaskan pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk menciptakan budaya politik dan partisipasi masyarakat.⁵ Pendidikan politik meliputi pengetahuan tentang politik, ap aitu partisipasi politik, sikap politik, dan keterampilan politik.

Karakteristik masyarakat Nagari Singkarak adalah masyarakat yang 70% nya ekonomi menengah, dimana tingkat pendidikan masyarakat disana adalah SMA dengan mayoritas pekerjaan non pegawai, sehingga disimpulkan bahwa masyarakat nagari singkarak belum cukup menerima Pendidikan politik melalui bangku Pendidikan formal, sehingga perlu saluran Pendidikan politik lainnya baik dari KPU sendiri maupun organisasi-organisasi

⁴ Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf, and Trisakti Handayani, "Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Sman 1 Balauring Lembata Ntt," *Jurnal Civic Hukum* 3, no. 2 (2018)

⁵ Ashika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol.10 No.1, 2018

setempat atau penyuluhan-penyuluhan dari partai politik. Di pemilu 2024, jumlah DPT Nagari Singkarak sebanyak 3361 dengan total pemilih pemula 248, terdapat laki-laki sebanyak 133 pemilih dan perempuan 115 pemilih. Terjadi kenaikan partisipasi pemilih masyarakat menjadi 77,547% dengan tingkat pemilih pemula 23%.⁶

Menghadapi pemilu 2024 mengingat pentingnya pendidikan politik dalam rangka menambah partisipasi politik, KPU Kabupaten Solok telah mulai gencar melakukan upaya pendidikan politik pemilih pemula pada Nagari Singkarak, diantaranya program KPU Goes To School yang bertujuan untuk meningkatkan pentingnya pemilihan pemimpin yang baik dan partisipasi politik dalam membangun Kabupaten Solok, sosialisasi, edukasi dan diskusi dengan pemilih milenial bahkan sampai menjangkau daerah pemilihan baru. Tak hanya KPU, Pendidikan politik juga dilakukan oleh organisasi pemuda, partai politik hingga kelompok lainnya.

Di dalam Islam, konsep pemilu masuk ke dalam muatan fiqh siyasah. Fiqh siyasah memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam politik dan memungkinkan pemerintah menerapkan sistem pemilu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi politik dalam fiqh siyasah dapat diartikan sebagai tindakan memberikan amanat kepada calon yang dipercaya, sejalan dengan nilai-nilai islam. Para ulama berpendapat bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum atau memilih pemimpin adalah kewajiban

⁶ Data dari KPU Kabupaten Solok, dibagikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sio, pada tanggal 1 April 2024.

yang harus dilakukan. Partisipasi politik dalam islam sangatlah berkaitan dengan prinsip musyawarah.⁷

Pengaruh antara Pendidikan politik terhadap partisipasi telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti Achmad Fernanda dengan judul tulisan Pengaruh pendidikan politik terhadap tingkat pemahaman pemilih pemula (Studi pada program Pendidikan Pemilu KESBANGPOL Kota Bekasi Tahun 2020. Adapun hasil penelitian menunjukan Pengetahuan politik mengenai tingkat kesadaran politik pemilih pemula baik dan penting. Apabila pendidikan politik diberikan secara rutin dan berkesinambungan, diharapkan perilaku mahasiswa akan semakin membaik. HP aku sebagian besar orang ditentukan oleh ilmu politik, sedangkan sebagian lainnya ditentukan oleh hal lain di luar penelitian. Sementara itu, Primandha Sukma Nur Wardhani, dalam artikel berjudul partisipasi politik elektoral di tingkat pemilih, menyimpulkan bahwa pendidikan politik bagi pelajar yang tergabung dalam masyarakat elektoral dan baru memasuki pemilu hendaknya menjadi program pendidikan untuk memahami kehidupan masyarakat. Kurangnya pengetahuan politik membuat memilih pemula rentan terhadap manipulasi oleh kelompok berkepentingan khusus.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk melakukan telaah yang sama tentang “Dampak Pendidikan

⁷ Hemafitria Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani, “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (April 2021): 37.

Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Metode kualitatif adalah metode dan teknik penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan permasalahan manusia. Sumber Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.⁸

C. Pembahasan

A. Nagari Singkarak

Kenagarian Singkarak merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Kenagarian Singkarak berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 7 Jorong, yaitu Jorong Talao, Jorong Kaluku, Jorong Dalimo, Jorong Lapau Pulau, Jorong Tampunik, Jorong Kubang Gajah, dan Jorong Lembang. Aspek kependudukan

⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Edisi Pert (Yogyakarta, 2020), 19.



pada tahun 2023, Nagari Singkarak memiliki jumlah total penduduk sebanyak 4.337 jiwa yaitu 1.264 KK dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebanyak 2.160 jiwa dan penduduk perempuannya yaitu sebanyak 2.177 jiwa.

Menurut tingkat pendidikan Nagari Singkarak Tahun 2023, tamatan SLTA mencapai angka paling tinggi yaitu sebanyak 37,52%, kemudian tamatan SD/Sederajat sebanyak 18,92%. Akan tetapi tingkat pendidikan yang paling sedikit di Nagari Singkarak ini adalah Tamat Akademi D1. Nagari Singkarak merupakan kelompok sosial tradisional yang mempunyai adat dan tradisi serta semangat persatuan dan kerjasama. Hal ini terlihat pada kegiatan masyarakat Nagari, salah satunya adalah kegiatan kelompok perempuan (pertemuan yasinan) yang diadakan seminggu sekali oleh setiap orang yang ada di Nagari Singkarak. Selain itu, terdapat juga beberapa lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Nagari Singkarak seperti LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari), Bundo Kanduang, PKK, Remaja Masjid, Kelompok Olahraga Nagari, kelompok kesenian (Sanggar), Lembaga Kesehatan (Puskesmas-Posyandu), serta Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

Penduduk Nagari Singkarak dominan bekerja di sektor pertanian, hal ini didukung oleh sumber daya alamnya yang subur untuk sektor pertanian, di samping ke sawah mereka juga mengolah ladang atau kebun. Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir danau memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Jumlah

penduduk Nagari Singkarak mencapai 2.361 orang bekerja (18-56 tahun), hanya 1.345 orang yang bekerja, 1.006 orang masih bersekolah. Jadi jumlah masa kerja di Nagari Singkarak yaitu 18 sampai 56 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali peluang kerja.⁹

Berdasarkan deskripsi singkat tentang nagari Singkarak tersebut, dapat ditarik analisi bahwasanya untuk Pendidikan politik Masyarakat di Nagari singkarak masih sangat minim, hal ini terlihat dari Tingkat pendidikan formal masyarakat yang mayoritas hanya sampai SMA, mayoritas pekerjaan Bertani dan nelayan, hingga tidak adanya aktivitas keseharian yang focus dalam bidang politik di nagari tersebut

B. Dampak Pendidikan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Nagari Singkarak

Secara teknis pelaksanaan pemilu di Nagari Singkarak melalui 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan dalam setiap tahapan tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang berisikan Perencanaan dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, Pencalonan Presiden dan Wapres, Pencalonan Anggota DPD, Pencalonan

⁹ Kantor Wali Nagari Singkarak, Profil Nagari, Dibagikan oleh Kasi Pemerintahan/Sekretariat PPS, Shanty Fitria, Pada 14 Juni 2024.



Anggota DPR RI, Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten, dan Kampanye. Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, partisipasi pada Pemilu 2024 dinilai jauh lebih meningkat. Partisipasi pemilih singkarak pada pemilu tahun 2024 naik menjadi 77, 54 % dari pada periode pemilu sebelumnya hanya di angka 70,90%.

Pada tahun 2024, jumlah pemilih di Nagari Singkarak sebanyak 3361 pemilih dan 248 nya adalah pemilih pemula dengan laki-laki berjumlah 133 pemilih dan perempuan 115 pemilih. Adapun jumlah TPS di Nagari Singkarak berjumlah 17 yang disebar di di setiap 7 Jorong yang ada di Nagari Singkarak.

Kenaikan jumlah partisipasi pemilih di singkarak di dominasi oleh kenaikan partisipasi pemilih pemula. Adanya peningkatan sebesar 8% dari tingkat partisipasi yang awalnya sebesar 15% menjadi 23%. Pada pemilu 2024 terjadi antusiasme dari pemilih pemula untuk ikut serta dalam memberikan hak suara. Hal ini tidak terlepas dari kian bertambahnya pengetahuan dan wawasan para pemilih pemula tentang hak dan kewajiban mereka untuk ikut andil dalam menentukan nasib bangsa.¹⁰

Guna menumbuhkan keikutsertaan para pemilih pemula dan membuka pemahaman mereka tentang pentingnya dalam memberikan hak suara, sejumla upaya pendidikan politik dilakukan

¹⁰ Data dari KPU Kabupaten Solok, dibagikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sio, pada tanggal 1 April 2024.

di Kanagarian Singkarak. Pendidikan politik dapat diperoleh melalui pendidikan formal bagi pemilih pemula, umumnya dilaksanakan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). Dalam mata pelajaran ini, pemilih pemula dibekali pengetahuan tentang berbagai hal terkait politik seperti konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban negara, proses pemilu hingga partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Disamping itu pemilih pemula juga dapat memperoleh pendidikan politik informal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemilih dalam kehidupan berpolitik di luar jalur pendidikan formal seperti diskusi publik, kegiatan kampanye, partisipasi dalam gerakan sosial dan lain sebagainya. Di Nagari Singkarak, pendidikan politik telah dilaksanakan oleh aktor pendidikan politik seperti KPU, LSM, Partai Politik, dan organisasi pemuda.

Adapun Pendidikan politik yang di lakukan oleh LSM adalah membentuk program pelatihan tentang proses politik, hak-hak politik dan keterlibatan dalam pemerintahan bagi masyarakat umum. LSM juga mengadakan diskusi publik atau seminar tentang isu-isu politik terkini untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta menyelenggarakan kampanye pendidikan pemilih untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya hak pilih dan cara memilih yang tepat. Adapun rincian kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh LSM dalam bentuk tabel berikut:



1. Bulan juli 2023, kegiatan Sosialisasi tentang hak dan kewajiban warga negara, penjelasan tentang sistem pemilu dan demokrasi, diskusi tentang isu-isu politik
2. Bulan September 2023, kegiatan Pelatihan kepemimpinan, pelatihan advokasi, pelatihan pemantauan pemilu.
3. Bulan Oktober 2023, Dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan, dialog antar umat beragama, dialog tentang toleransi dan kerukunan
4. Desember 2023. Kampanye anti politik uang, kampanye anti hoax, kampanye untuk meningkatkan partisipasi pemilih

Sementara itu Pendidikan politik oleh organisasi pemuda yakni mengadakan debat atau forum diskusi antarpemuda untuk memperebatkan kebijakan public dan isu-isu politik, organisasi pemuda ini juga melakukan pelatihan kepemimpinan untuk membekali pemuda dengan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan.

Partai politik sebagai pihak yang ikut berlaga dan bertujuan untuk meraih suara tak luput menjalankan perannya dalam memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat, diantaranya adalah menyelenggarakan kaderisasi untuk melatih anggota partai tentang ideologi, program, dan strategi politik, selain itu juga mengadakan pertemuan rutin untuk diskusi dengan anggota partai yang membahas tentang kebijakan partai hingga melakukan kampanye Pendidikan politik untuk memperkenalkan calon partai,

platform partai, dan tujuan partai kepada pemilih.¹¹ Adapun Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Singkarak, yakni:

NO	Tanggal	Kegiatan	Materi
1.	Juni 2023	Sosialisasi pemilu	Hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu, tata cara pemungutan suara, dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu
2.	Juni 2023	Workshop tentang isu-isu politik lokal	Permasalahan yang dihadapi desa, peran partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan strategi advokasi kebijakan public
3.	Agustus 2023	Pelatihan kepemimpinan politik bagi pemuda desa	Kepemimpinan politik, peran pemuda dalam Pembangunan nagari, dan strategi membangun jaringan public
4.	September 2023	Pemutaran film dan diskusi tentang Sejarah demokrasi di Indonesia	Perjuangan demokrasi di Indonesia, pentingnya demokrasi bagi kehidupan bermasyarakat, dan peran warga negara dalam menjaga demokrasi
5.	November 2023	Lomba cerdas cermat tentang pengetahuan politik	Istem politik di Indonesia, Pancasila sebagai dsar negara, dan hak kewajiban warga negara

¹¹ Wawancara dengan Ketua PPS Nagari Singkarak, Yozi Tama, 14 Juni 2024, di Kantor Wali Nagari Singkarak



Tak hanya itu, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, bertugas memastikan seluruh masyarakat Indonesia paham dan mengerti baik tentang proses, teknis ataupun tatacara pelaksanaan pemilu. Sesuai undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan salah satu tujuan utama KPU, maka KPU akan memberikan kesadaran dan peningkatan nilai pemilu dan pendidikan politik melalui kolaborasi macam-macam asosiasi pemberian dan pemajuan pendidikan politik yang dilakukan ke PU Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Pendidikan pemilih: KPU sering mengadakan kampanye Pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka. Kampanye ini dapat mencakup penyuluhan tentang proses pemilihan umum, cara memilih yang benar dan dampak dari tidak mengguna hak pilih.
2. Penyuluhan di sekolah: KPU juga melakukan penyuluhan di sekolah yang pesertanya adalah pemilih pemula, kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya terlibat dalam politik sejak dini, seperti simulasi pemilihan atau diskusi tentang demokrasi dan partisipasi politik.
3. Sosialisasi melalui media: KPU memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti televisi, radio, internet, dan media sosial lainnya seperti membuat iklan

Masyarakat, program edukasi, dan konten media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilihan umum, prosedur pendaftaran pemilih dan jadwal pemungutan suara. Kampanye digital ini juga dapat digunakan untuk mengajak Masyarakat menggunakan hak suara mereka dan memilih secara bertanggung jawab.

4. Pelatihan dan workshop: KPU mengadakan pelatihan untuk penyelenggara pemilu, relawan pemilu, dan pemantau pemilu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan dan prosedur pemilu, serta pentingnya mengawal proses pemilu yang adil dan transparan.
5. Debat publik dan diskusi panel: KPU dapat mengorganisir debat public antara calon- calon bersaing untuk memberikan pemilih pemahaman yang lebih baik tentang visi dan misi. Diskusi ini juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu terkini yang relevan dengan pemilihan.

Pendidikan politik memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah pemilih pemula. Pendidikan politik membantu pemilih pemula memahami pentingnya pemilu, prinsip-prinsip demokrasi dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Menyelesaikan pendidikan politik dan sosial membantu pemilih pemula untuk memiliki orientasi terhadap keputusannya dalam memilih. Seperti yang diakui oleh sejumlah informan yang

penulis ambil secara acak dan perwakilan pemilih pemula dari tiap jorong di kanagarian singkarak.¹²

Informan 1, menyebutkan: “Sebagai pemilih pemula, saya merasa sangat beruntung karena telah mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik yang memadai. Melalui program-program ini, saya bisa memahami pentingnya hak suara dan dampak dari pilihan yang diambil. Sosialisasi tersebut membantu saya mengenali visi dan misi para calon, sehingga saya dapat memilih dengan lebih bijak. Pendidikan politik juga memberikan wawasan tentang proses demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya percaya, dengan pengetahuan ini, saya dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.”

Informan 2, mengatakan: “Pandangan saya tentang menentukan pilihan dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik yang saya alami. Sosialisasi politik memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan bagaimana suara saya bisa mempengaruhi arah kebijakan negara. Melalui diskusi di sekolah, media sosial, dan perbincangan dengan keluarga serta teman, saya belajar mengenali berbagai platform dan ideologi partai politik. Sosialisasi politik membuat saya merasa lebih terlibat dan

¹² Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM pada KPU Kabupaten Solok, Novialdi Putra, 3 Juli 2024

bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih saya untuk masa depan yang lebih baik.”

Informan 3, mengungkapkan: “Sebagai pemilih pemula, sosialisasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pilihan saya. Melalui berbagai sumber informasi seperti media sosial, kampanye, diskusi di sekolah, dan percakapan dengan keluarga serta teman-teman, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kandidat dan partai politik yang ada. Sosialisasi politik membantu saya memahami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh setiap kandidat, sehingga saya bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan rasional. Selain itu, dengan adanya sosialisasi politik, saya merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi dan memahami pentingnya hak suara saya dalam menentukan masa depan negara.”

Informan 4, mengatakan: “Sebagai pemilih pemula, saya merasa sosialisasi politik sangat penting dalam membantu saya menentukan pilihan. Sosialisasi politik memberikan informasi yang tepat dan mendalam mengenai kebijakan, visi, dan misi para kandidat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti diskusi, debat publik, dan kampanye, saya dapat memahami lebih baik tentang siapa yang paling sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi politik juga membantu saya mengenali isu-isu penting yang mungkin sebelumnya tidak saya ketahui, sehingga saya bisa membuat



keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin. Sosialisasi politik tidak hanya membekali saya dengan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.”

Informan 5, menerangkan: Pandangan saya tentang pentingnya menentukan pilihan dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh sosialisasi politik yang saya terima. Melalui sosialisasi politik, baik dari keluarga, sekolah, media, maupun diskusi dengan teman-teman, saya bisa lebih mengenal program dan visi-misi dari para calon pemimpin. Ini membantu saya membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana. Sosialisasi politik juga menekankan pentingnya partisipasi dalam pemilu sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dan sarana untuk mengekspresikan hak-hak saya. Sosialisasi politik ini berperan besar dalam membentuk perspektif saya sebagai pemilih pemula, memberikan pemahaman yang mendalam dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.”

Infoman 6, mengatakan: “Saya merasa bahwa sosialisasi politik memiliki pengaruh yang berarti dalam menentukan pilihan saya. Melalui berbagai bentuk sosialisasi seperti kampanye, diskusi di media sosial, seminar, dan interaksi langsung dengan politisi atau tim kampanye, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang visi, misi, dan program kerja calon atau partai yang akan saya pilih. Sosialisasi politik membantu saya untuk membandingkan berbagai kandidat dan



partai, serta memahami dampak dari kebijakan yang mereka tawarkan terhadap masa depan saya dan masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi politik juga membuat saya lebih kritis dan bijak dalam menilai janji-janji kampanye, sehingga saya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang akurat.

Informan 7, “Pendidikan politik bagi saya merupakan hal yang sangat penting. Sejak sekolah, kita perlu diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara agar dapat berpartisipasi aktif. Banyak pemilih pemula yang masih bingung memilih calon pemimpin seperti saya sendiri karena kurangnya informasi. Dengan diadakannya pendidikan politik, selain mendorong saya untuk tidak hanya memilih, tetapi juga terlibat dalam proses politik, misalnya dengan bergabung dalam organisasi atau mengikuti kegiatan kampanye.”

Pentingnya keberadaan sosialisasi dan Pendidikan politik bagi masyarakat juga diakui oleh pegawai kantor wali nagari, ketua PPS Nagari Singkarak, Bapak Yozi Tama, mengatakan : “Saya sangat mengakui pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Keberadaan pendidikan politik di desa kami sangat penting untuk membangun kesadaran politik warga. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang baik juga dapat membantu masyarakat mengenali calon pemimpin dan



program-program yang ditawarkan. Hal ini penting agar mereka tidak hanya memilih berdasarkan isu sesaat, tetapi berdasarkan visi dan misi yang jelas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengadakan berbagai kegiatan, seperti diskusi dan pelatihan, agar setiap warga nagari singkarak ini dapat memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Dengan pendidikan politik yang tepat, saya yakin masyarakat kita akan lebih cerdas dalam memilih dan berkontribusi pada pembangunan desa.”.

Disamping itu, tokoh agama pun ikut memberikan pendapat, ustaz Mustafa, mengatakan: “pendidikan politik adalah bagian dari amal jariyah. Ia mengajak masyarakat untuk aktif dalam politik demi mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Menurutnya, sosialisasi politik yang baik akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak dini agar generasi mudah memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara . ia mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan. Sama dengan pernyataan tokoh adat di Nagari Singkarak, bapak Burhanuddin yang mengungkapkan: “sosialisasi politik adalah langkah penting untuk membangun kesadaran bersama-sama. Dengan pendidikan politik, masyarakat akan lebih paham tentang hak dan tanggung jawab



mereka dalam mengelola potensi daerah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.”

Selain itu, tokoh pemuda, Yogi Gunawan, juga menyebutkan “Pendidikan politik mendorong pemuda dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan nagari. Dengan memahami hak dan tanggung jawab, mereka akan lebih berani menyuarakan aspirasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan sosialisasi politik, masyarakat akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pemuda percaya bahwa pemahaman politik yang baik dapat membekali masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain dalam menentukan arah pembangunan.”

Terkait dengan masuknya pemilih pertama kali, PKPU No. 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pemilih pemula wajib untuk memilih pemimpin dalam pemilu. Dalam ini dari Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah , PKPU No. 8 Tahun 2017 dikaitkan dengan konsep Siyasah Syar’iyyah, yaitu menyeru Masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mencapai kemashlahatan dan tidak merugikan. Dalam definisi Fiqih Siyasah, kewajiban membentuk pemimpin adalah keyakinan bahwa tidak akan ada kebenaran tanpa adanya majelis, bahwa suatu majelis tidak akan ada tanpa pemimpin, dan tidak akan ada pemimpin tanpa ada ketaatan. Sedangkan menurut ijma’ para ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:



1. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa penguasa menggantikan jabatan kenabian yang diperlukan untuk melestarikan agama dan memerintah dunia. Dan sekelompok ulama mengatakan bahwa kewenangan pengangkatan pemimpin (Imam) bersifat sewenang-wenang, karena ulama taat kepada imam atau Khalifah, yang mengharamkan kezaliman dan perlawanan terhadap perang dan agresi. Kewajiban membentuk pemimpin adalah fardhu kifayah, begitu pula kewajiban berperang jihad dan mencari ilmu.
2. An-Nawawi berpendapat bahwa para ulama telah sepakat bahwa tugas umat islam adalah memilih dan mengangkat pemimpinnya.
3. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa menjaga imamah adalah suatu kewajiban. Kewajiban ini telah diakui oleh syariat dan kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Ketika nabi wafat, para sahabat langsung bersumpah setia kepada Abu Bakar As-Siddiq r.a dan mempercayakannya untuk mengurus urusan. Hal ini berlaku sepanjang waktu sampai tercapai kesepakatan. Hal ini jelas menunjukkan kewajiban memilih imam atau penguasa.¹³

Dalam bidang fiqh siyasah, kekhawatiran pertama umat Islam sepeninggal nabi adalah suksesi politik. Sebagaimana

¹³ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Edisi Indonesia) Cet. I, (Jakarta: Qisthi Press, 2015) H.15.

dipahami, nabi tidak memutuskan siapa yang akan mengantikannya atau bagaimana proses penggantian itu dilakukan. Oleh karena itu, dalam sejarah Islam dikenal banyak cara untuk menentukan kepala negara dan bahkan ada juga kriteria yang sesuai dengan konteks sosio-historis saat ini. Misalnya dalam kasus Khulafa al-Rasyidin, keputusan Abu Bakar didasarkan pada pilihan diskusi publik, sedangkan keputusan Umar Bin Khattab didasarkan pada penunjukan pendahuluannya sebagai kepala pemerintah. Usman bin Affan, memutuskan berdasarkan prinsip seleksi berdasarkan pertimbangan yang adil, dan Ali bin Abi Thalib memutuskan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah untuk mufakat. Kenyataan ini dimungkinkan oleh perubahan sosial dan budaya, sehingga sifat biasa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain.

Perpaduan permasalahan tersebut dalam konteks perspektif Fiqih Siyasah berkaitan dengan adanya aturan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan pemimpin. Ijma' ulama menjelaskan perlunya menunjuk orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas imam di kalangan umat, meskipun Imam al-Ashm tidak sependapat. Hanya ada satu pendapat diantara mereka mengenai keabsahan kewajiban mereka, baik berdasarkan akal maupun syariat. Kelompok ulama lain berpendapat bahwa amanah pengangkatan seorang Imam (pemimpin) tidak berdasarkan Syariah. Alasannya, imam (Khalifah) wajib mengawasi urusan agama, meski alasannya



tidak mempertimbangkan pengangkatan Imam (pimpinan) sebagai bentuk agama. Artinya pengangkatan seorang Imam tidak wajib. Nalar secara sederhana menyatakan bahwa setiap orang yang berakal sehat harus waspada terhadap pelecehan dan konflik serta bersikap adil dalam memberikan layanan mengelola hubungan.

Perlunya mengangkat seorang Imam (pimpinan) maka kewajibannya seperti kewajiban berpegang jihad dan menuntut ilmu yaitu fardhu kifayah. Artinya apabila seseorang yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi imam (Khalifah) oleh orang lain, maka perbuatannya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada yang diangkat menjadi imam (Khalifah), maka harus dibentuk dua kelompok. Pertama, adanya kelompok pemilih yang tugasnya memilih Imam bagi umat. Kedua, adanya kelompok imamah (pemimpin) yang fungsinya mengangkat salah satu diantara mereka menjadi imam (Khalifah). Oleh karena itu, jika seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk memilih penguasa, berarti ia tidak melakukan apa yang dibolehkan oleh hukum Islam, karena kekuasaan hukumnya wajib. Mereka yang tinggal di wilayah Imam (Khalifah) tidak mempunyai kelebihan dibandingkan mereka yang tinggal di tempat lain. Namun, mereka yang tinggal di wilayah yang sama dengan imam (Khalifah) bertanggung jawab mengangkat imam menurut adat istiadatnya dan bukan berdasarkan prinsip syariah. Kita dapat memutuskan bahwa seseorang harus



mempunyai kesempatan. Di Indonesia sendiri sistem pemilihan pemimpin bersifat demokratis. Dan akan berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan di wilayah tersebut.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329. doi:10.38043/jids.v4i2.2496.
- Azmi, Laila, Syamsul Muarif Batubara, and Cerah Hati. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis." *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 173–86. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalcitizen/article/view/2382>.
- Fitria, Dika, Universitas Islam Negeri, and Raden Intan Lampung. "DESA (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) DESA (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)," 2023.
- Hemafitria, Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2021): 37. doi:10.26418/jppkn.v2i1.45310.
- Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3, no. 1 (2021): 85–100. <http://jurnal.utu.ac.id/baktiku/article/view/3437>.
- Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020" 7, no. 3 (2021): 6.

¹⁴ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al-qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h.23.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. Edisi Pert. Yogyakarta, 2020.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

Nasuha, Cecep Nana, and Cecep Abdul Cholik. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati Di Kabupaten Kuningan)." *Syntax Idea* 1, no. 8 (2019): 50–66. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/102>.

Noer, Laquita Sabilia, Shela Hendrika Utami, and Sri Ruhyatul Mutmainnah. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 390–409. doi:10.15642/mal.v3i5.146.

Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. doi:10.24114/jupiis.v10i1.8407.

Pattipeilohy, Adnan, Nurbani Yusuf, and Trisakti Handayani. "Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Sman 1 Balauring Lembata Ntt." *Jurnal Civic Hukum* 3, no. 2 (2018): 128. doi:10.22219/jch.v3i2.8653.

Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–64. doi:10.36546/solusi.v18i2.290.

Sari, N S. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 Di Sma Kecamatan Bantul." *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 2019, 323–31.

Sismita, Mega. "Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Di Kabupaten Solok General Election Commission ' S Political Education Strategy In Increasing The Participation Of Beginner Voters In The 2020 Regent And Deputy Regent Elections In Solok Regency" 2, no. 2 (2020): 98–112.



